

SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 139 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Purworejo dan menyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2023;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889-2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diubah;

*

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 139 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Ketentuan angka 2.1, gambar 2.1 BAB II, Tabel 4.1 BAB IV, angka 6.2 BAB VI, dan tabel 7.1 BAB VII dalam Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 139 Seri E Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 139 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 72 Seri E Nomor 58), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024 NOMOR 28 SERI E NOMOR 27



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 139 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021-2026

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, dapat diuraikan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo bertugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2 Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Pemerintah Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

2.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum;
- 4) pelaksanaan pelayanan administratif di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsi.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:

- a) Bagian Pemerintahan;

Bagian Pemerintahan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan

mengevaluasi kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi tata pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan dan fasilitasi kerjasama daerah; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Pemerintahan terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;

- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

c) Bagian Hukum

Bagian Hukum bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi dan koordinasi hukum; dan

- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Hukum terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang perekonomian dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/ jasa; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsi.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan dan mengoordinasikan:

- a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah,

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

b) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan;
- 4) penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pelaksanaan administrasi pembangunan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

c) Bagian Pengadaan Barang/ Jasa

Bagian Pengadaan Barang/ Jasa, bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah dan melaksanakan pembinaan administrasi di bidang pengadaan barang/ jasa serta mengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pengadaan Barang/ jasa menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;

- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/ jasa;
- 4) pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Pengadaan Barang/ Jasa terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

- d. Asisten Administrasi Umum, bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, melaksanakan pelayanan administratif di bidang administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- 4) pelaksanaan pelayanan administratif di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- 5) pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada perangkat daerah; dan

- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah terkait tugas dan fungsi.

Asisten Administrasi Umum membawahkan dan mengoordinasikan:

a) Bagian Umum

Bagian Umum bertugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan;
- 2) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan; dan
- 3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsi.

Bagian Umum membawahkan:

- 1) Subbagian Perencanaan, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, yang meliputi:
 - a) menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
 - b) menyusun perjanjian kinerja; dan
 - c) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya.
- 2) Subbagian Keuangan, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan administrasi keuangan;
- b) menyelenggarakan administrasi keuangan dan operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- c) merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan pertanggungjawaban anggaran;
- d) menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan pertanggungjawaban;
- e) melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- f) melaksanakan tugas penatausahaan keuangan;
- g) melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- h) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban;
- i) melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j) melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

- 3) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga, dan Kepegawaian, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kepegawaian, yang meliputi:

- a) menyelenggarakan administrasi barang milik daerah;
- b) menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- c) menyelenggarakan administrasi umum;
- d) menyelenggarakan pengadaan barang milik daerah;
- e) menyediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- f) menyelenggarakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- g) melaksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;
- h) melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat;
- i) melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat daerah;
- j) melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;
- k) melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
- l) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;
- m) melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati

dan Wakil Bupati serta Sekretariat daerah;
dan

- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi bertugas menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang penataan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penataan organisasi;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan organisasi; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum terkait dengan tugas dan fungsi.

Susunan organisasi Bagian Organisasi terdiri atas Kepala Bagian, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana.

c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi;
- 2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi dan dokumentasi;
- 3) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi dan dokumentasi; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Susunan Organisasi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

- 1) Subbagian Protokol, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang protokol, yang meliputi:
 - a) memfasilitasi keprotokolan;
 - b) melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
 - d) menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e) menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
 - f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

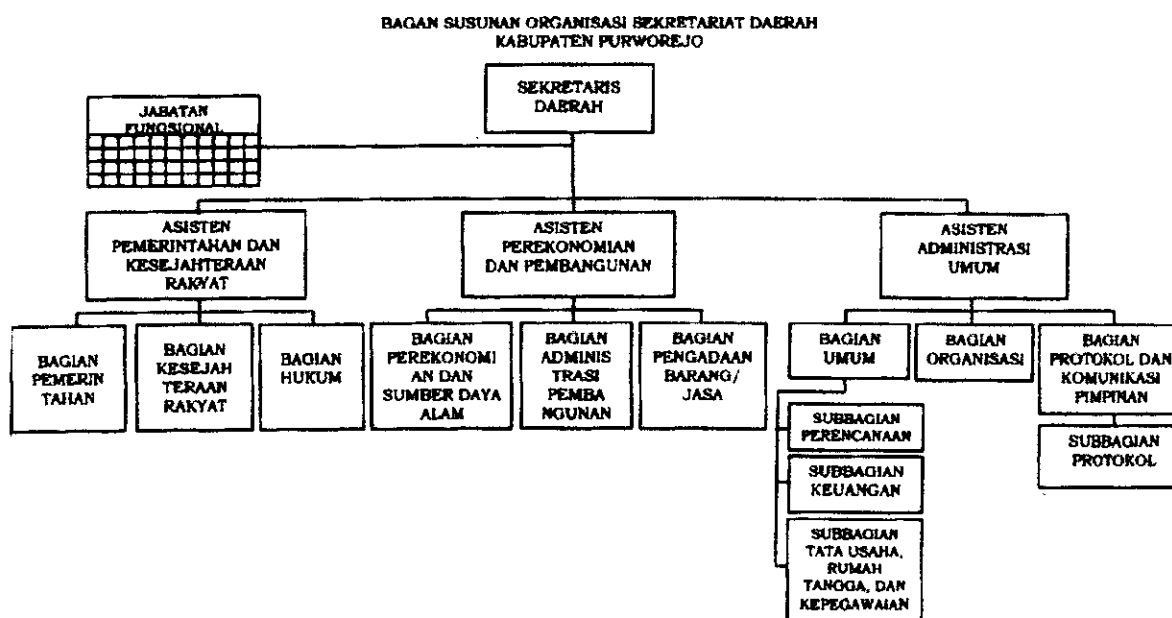
e. Jabatan Fungsional

Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 141 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1

Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2021 – 2026 dirinci secara operasional kedalam tujuan dan sasaran pembangunan supaya lebih terarah dalam implementasinya. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mendukung misi pembangunan yang keempat yaitu “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)”. Misi tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan *Tata Kelola Kelembagaan Berkelas Dunia* yang diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Tujuan ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu: 1) *Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel* yang diukur melalui indikator nilai Maturitas SPIP, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan nilai SAKIP; 2) *Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel* yang diukur melalui indikator Indeks Profesionalitas ASN; serta 3) *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima* yang diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Inovasi Daerah (IID).

Berpedoman pada sasaran ketiga yaitu *Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima* yang diukur melalui indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP), Sekretariat Daerah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,15	4,20	4,25	4,30	4,35
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik		Nilai SAKIP	64,00				
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	70,00				

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.2 Kegiatan

Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Purworejo

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode		Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2020	2021	2022			2023			2024			2025							2026
		UR	B/P U				PRG	KEG	SUB X	Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target			Pagu (Rp.)
(1)	(2)			3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					Indeks Pelayanan Publik	Indeks		4,09	3,86	4,15		4,20		4,25		4,30		4,35		4,35					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks		81,96	80,78	83,00		84,00		85,00		86,00		87,00		86,00					
		4 02 01			Persentase Pelaksanaan Penanggung Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	%		100	100	100	25.223.433.099	100	24.196.390.448	100	26.592.545.154	100	27.313.677.489	100	27.456.000.407	100	128.782.548.585		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201			Hasil: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen				7	115.954.800	7	115.954.800	7	115.954.800	7	115.954.800	7	115.954.800	35	579.774.000		Sekda	Kabupaten Purworejo	
					Keluaran: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
		4 01 01 201 01			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	47	41	15	59.364.600	15	59.364.600		15	59.364.600	15	59.364.600	15	59.364.600	45	178.023.800		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 02			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1	7.656.600	1	7.656.600								2	35.313.200		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 0002			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen								1	7.656.600	1	7.656.600	1	7.656.600	3	27.969.800		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 03			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1	7.936.600	1	7.936.600								2	15.873.200		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 0003			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen								1	7.936.600	1	7.936.600	1	7.936.600	3	23.809.800		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 04			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen				1	8.005.500	1	8.005.500							2	16.011.000		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 0004			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen								1	8.005.500	1	8.005.500	1	8.005.500	3	24.016.500		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 05			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1	7.041.500	1	7.041.500								2	14.089.000		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 0005			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen								1	7.041.500	1	7.041.500	1	7.041.500	3	21.124.500		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 06			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			16	14.326.800	16	14.326.800								32	28.653.600		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 0006			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan								16	14.326.800	16	14.326.800	16	14.326.800	48	42.980.400		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 07			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			6	11.623.200	6	11.623.200								12	23.246.400		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 201 0007			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan								6	11.623.200	6	11.623.200	6	11.623.200	18	24.859.600		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 202			Hasil: Terlayannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		100	100	100	11.993.865.452	100	12.966.722.799	100	14.312.977.507	100	16.084.109.842	100	16.227.032.760	100	71.584.708.960		Sekda	Kabupaten Purworejo	
					Keluaran: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																				
		4 01 01 202 01			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	12	140	11.874.284.752	140	12.847.647.099								280	24.772.426.851		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 202 0001			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan														420	46.266.878.009		Sekda	Kabupaten Purworejo	
		4 01 01 202 02			Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Tugas ASN	Dokumen			12	18.533.800	12	18.533.800								24	37.067.600		Sekda	Kabupaten Purworejo	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		U	P/R	K/ Sub K				Realisasi	Realisasi	2022			2023			2024			2025			2026				
										Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)					
																						2020	2021			
(1)	(2)	4	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Kabupaten Purworejo	
		4	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen				12	66.381.200					28.533.800	12	18.533.800	12	18.533.800	36	55.601.400	Kabupaten Purworejo	
		4	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen								12	66.381.200						24	132.762.400	Kabupaten Purworejo	
		4	01	202	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				24	4.860.900	24	4.860.900			4.860.900	24	4.860.900	24	4.860.900	72	14.532.700	Kabupaten Purworejo	
		4	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				6	4.972.900	6	4.972.900								12	9.945.800	Kabupaten Purworejo	
		4	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan								6	4.972.900	6	4.972.900	6	4.972.900	18	14.918.700	Kabupaten Purworejo		
		4	01	202	0006	Pengelolaan dan Penyaji: Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				1	9.881.600	1	9.881.600								2	19.763.200	Kabupaten Purworejo	
		4	01	202	0006	Pengelolaan dan Penyaji: Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen									1	9.881.600	1	9.881.600	1	9.881.600	3	29.644.800	Kabupaten Purworejo	
		4	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Laporan	33	14	26	9.909.400	26	9.909.400									52	19.818.800	Kabupaten Purworejo	
		4	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	Laporan								26	9.909.400	26	9.909.400	26	9.909.400	78	79.778.200	Kabupaten Purworejo		
		4	01	202	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen				1	4.540.900	1	4.540.900							2	9.081.800	Kabupaten Purworejo		
		4	01	202	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen								1	4.540.900	1	4.540.900	1	4.540.900	3	13.622.700	Kabupaten Purworejo		
		4	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Hasil/ Terlayannya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	%				100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	100	85.000.000	Kabupaten Purworejo		
		4	01	203	01	Penyusunan Perencanaan Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran: Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Dokumen				1	5.000.000	1	5.000.000							2	10.000.000	Kabupaten Purworejo		
		4	01	203	0001	Penyusunan Perencanaan Keluaran Barang Milik Daerah SKPD	Keluaran: Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen								1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	Kabupaten Purworejo		
		4	01	203	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan				1	12.000.000	1	12.000.000							2	24.000.000	Kabupaten Purworejo		
		4	01	203	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan								1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	3	36.000.000	Kabupaten Purworejo		
		4	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil/ Terlayannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%				100	396.715.200	100	396.715.200	100	396.715.200	100	396.715.200	100	396.715.200	100	1.983.576.000	Kabupaten Purworejo		
		4	01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit																	Kabupaten Purworejo	
		4	01	205	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit				1	26.196.600	1	26.196.600	1	26.196.600	1	26.196.600	1	26.196.600	3	78.589.800	Kabupaten Purworejo		
		4	01	205	02	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kepegawaian	Paket				0	0	0	0	0						0	0		Kabupaten Purworejo	
		4	01	205	0002	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kepegawaian	Paket								0	0	0	0	0	0	0	0		Kabupaten Purworejo	
		4	01	205	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen				1	36.494.600	1	36.494.600							2	77.989.200	Kabupaten Purworejo		
		4	01	205	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen								1	36.494.600	1	36.494.600	1	36.494.600	3	109.489.800	Kabupaten Purworejo		
		4	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen				1	24.024.000	1	24.024.000							2	48.048.000	Kabupaten Purworejo		

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		UR	B/P U	PAG	KEG	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026						
										Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)					
(1)	(2)	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4	01	01	212	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket							1	657.164.000	1	657.164.000	1	657.164.000	3	1.971.492.000	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	212	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket		12	1	349.994.000	1	349.994.000							2	699.988.000	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	212	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket							1	349.994.000	1	349.994.000	1	349.994.000	3	1.049.982.000	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	213		Penataan Organisasi	Hasil: Terlaksananya Penataan Organisasi	%		100	100	100	676.289.500	100	676.289.500	100	676.289.500	100	676.289.500	100	676.289.500	100	3.381.447.500	Setda	Kabupaten Purworejo
								Keluaran: Persentase Pelaksanaan Penataan Organisasi																		
		4	01	01	213	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen		2	1	1	295.708.300	1	295.708.300							2	591.416.600	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	01	213	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen							1	295.708.300	1	295.708.300	1	295.708.300	3	887.124.900	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	213	02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		2	1	1	111.329.500	1	111.329.500							2	222.659.000	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	01	213	0002	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan							1	111.329.500	1	111.329.500	1	111.329.500	3	333.988.500	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	213	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		4	1	1	161.686.100	1	161.686.100							2	323.372.200	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	01	213	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen							1	161.686.100	1	161.686.100	1	161.686.100	3	485.058.300	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	213	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen		1	-	1	67.565.600	1	67.565.600							2	135.131.200	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	01	213	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen							1	67.565.600	1	67.565.600	1	67.565.600	3	202.696.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	213	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen		-	-	1	40.000.000	1	40.000.000							2	80.000.000	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	01	213	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen							1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	214		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Hasil: Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		100	100	100	710.415.200	100	710.415.200	100	710.415.200	100	710.415.200	100	710.415.200	100	3.552.076.000	Setda	Kabupaten Purworejo
								Keluaran: Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan																		
		4	01	01	214	01	Facilitasi Keprotokolkan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolkan	Laporan		12	12	1	168.853.600	1	168.853.600							2	337.707.200	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	01	214	0001	Facilitasi Keprotokolkan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Keprotokolkan	Laporan							1	168.853.600	1	168.853.600	1	168.853.600	3	506.560.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	214	02	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan		13	12	1	195.470.000	1	195.470.000							2	390.940.000	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	01	214	0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan							1	195.470.000	1	195.470.000	1	195.470.000	3	586.410.000	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	01	214	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan		300	500	1	346.091.600	1	346.091.600							2	692.183.200	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	01	214	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan							1	346.091.600	1	346.091.600	1	346.091.600	3	1.038.274.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik							Nilai SAKIP	Nilai		61,30	62,29	64,00														
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan						Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		63,74	65,33	70,00														
		4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEHATAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%		100	100	100	9.408.000.000	100	6.778.000.000	100	7.446.000.800	100	7.647.000.000	100	7.628.000.000	100	38.908.000.000	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	02	201		Administrasi Tata Pemerintahan	Hasil: Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	%		100	100	100	950.318.700	100	550.318.700	100	550.318.700	100	550.318.700	100	550.318.700	100	3.151.593.500	Setda	Kabupaten Purworejo
								Keluaran: Persentase Pelayanan Administrasi Tata Pemerintahan																		
		4	01	02	201	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen		3	1	1	469.087.700	1	269.087.700							2	738.175.400	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	02	201	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen							1	269.087.700	1	269.087.700	1	269.087.700	3	807.263.100	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	02	201	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen				1	209.371.000	1	109.371.000							2	318.742.000	Setda	Kabupaten Purworejo
		4	01	02	201	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen							1	109.371.000	1	109.371.000	1	109.371.000	3	578.113.000	Setda	Kabupaten Purworejo	

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		UN	B/P	Keg				Sub K	2020	2021	2022			2023			2024			2025			Target	Pagu (Rp.)			Target	Pagu (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
											Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(1)	(2)	4	01	02	201	03	3			5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		UR	B/P U	PRG	KEG	SUB K				2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp.)			
												Realisasi	Realisasi	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)					
(1)	(2)	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4	01	08			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	1.705.800.000	100	1.228.000.000	100	1.349.000.000	100	1.388.000.000	100	1.382.000.000	100	7.047.000.000	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	201		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Hasil: Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	529.244.200	100	445.244.200	100	449.244.200	100	450.244.200	100	450.244.200	100	2.324.221.000	Setda	Kabupaten Purworejo	
								Keluaran: Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																		
		4	01	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	1	1	1	101.007.600	1	96.007.600							2	197.015.200	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	201	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen							1	96.007.600	1	96.007.600	1	96.007.600	3	288.022.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	201	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	1	1	1	108.935.400	1	99.935.400							2	208.870.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	201	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan							1	99.935.400	1	100.935.400	1	100.935.400	3	301.806.200	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	201	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	-	1	1	136.030.400	1	116.030.400							2	252.060.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	201	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen							1	116.030.400	1	116.030.400	1	116.030.400	3	348.091.200	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	201	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	1	-	1	183.270.800	1	133.270.800							2	316.541.600	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	201	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen							1	137.270.800	1	137.270.800	1	137.270.800	3	411.812.400	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	202		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Hasil: Terlaksananya Administrasi Pembangunan	%	100	100	100	350.966.700	100	274.966.700	100	314.966.700	100	314.966.700	100	314.966.700	100	1.570.833.500	Setda	Kabupaten Purworejo	
								Keluaran: Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan																		
		4	01	03	202	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen	1	-	1	39.065.400	1	39.065.400							2	78.130.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	202	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen							1	39.065.400	1	39.065.400	1	39.065.400	3	117.196.200	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	202	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	1	1	1	148.693.900	1	118.693.900							2	267.387.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	202	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan							1	118.693.900	1	118.693.900	1	118.693.900	3	356.081.700	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	202	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	-	1	1	163.207.400	1	117.207.400							2	280.414.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	202	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan							1	157.207.400	1	157.207.400	1	157.207.400	3	471.622.200	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	203		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Hasil: Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100	100	736.876.000	100	431.876.000	100	508.876.000	100	543.876.000	100	540.876.000	100	2.762.380.000	Setda	Kabupaten Purworejo	
								Keluaran: Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
		4	01	03	203	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	12	1	265.422.800	1	157.422.800							2	422.845.600	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	203	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen							1	191.422.800	1	196.422.800	1	193.422.800	3	561.268.400	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	203	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	12	1	245.003.800	1	135.003.800							2	380.007.600	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	203	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen							1	165.003.800	1	185.003.800	1	185.003.800	3	535.011.400	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	203	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	12	12	23	226.449.400	23	139.449.400							46	365.898.800	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	203	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang							23	152.449.400	23	162.449.400	23	162.449.400	69	477.348.200	Setda	Kabupaten Purworejo	
		4	01	03	204		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Hasil: Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	85.913.100	100	75.913.100	100	75.913.100	100	75.913.100	100	75.913.100	100	389.565.500	Setda	Kabupaten Purworejo	
								Keluaran: Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam																		
		4	01	03	204	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	-	9	1	64.278.700	1	54.278.700							2	118.557.400	Setda	Kabupaten Purworejo	

Tujuan Perangkat Daerah	Saaran Perangkat Daerah	Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		UR	B/P U	PRG	KEG				SUB K	2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Pagu (Rp.)	Target			Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
												Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)								
(1)	(2)	4	01	03	204	0001	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen								1	54.278.700	1	54.278.700	1	54.278.700	3	162.836.100			Kabupaten Purworejo			
		4	01	03	204	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen			1	11.219.400										2	22.438.800			Kabupaten Purworejo		
		4	01	03	204	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen							1	11.219.400	1	11.219.400	1	11.219.400	3	33.658.200			Kabupaten Purworejo			
		4	01	03	204	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Pencanaan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen			1	10.415.000										2	20.830.000			Kabupaten Purworejo		
		4	01	03	204	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen							1	10.415.000	1	10.415.000	1	10.415.000	3	31.245.000			Kabupaten Purworejo			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja sesuai dengan bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Indikator kinerja dapat dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Untuk itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesainya kegiatan. Bertujuan untuk melakukan evaluasi apakah kegiatan bersangkutan memberikan manfaat terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perlu dicantumkan indikator kinerja SKPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD ditindaklanjuti atau dikawal didalam tiap-tiap Renstra SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terwujud keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD.

Indikator Kinerja SKPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, merupakan hal yang perlu diprioritaskan oleh setiap SKPD mengingat hal tersebut yang terkait langsung dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana Tabel 7.1 (T-C.28)

Tabel 7.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Indikator Tujuan								
1	Indeks Pelayanan Publik	4,09	3,86	4,15	4,20	4,25	4,30	4,35	4,35
2	Nilai SAKIP	61,30	62,29	64,00					
	Indikator Sasaran								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	81,96	80,78	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	87,00
2	Indeks Reformasi Birokrasi	63,74	65,33	70,00					
	Indikator Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
1	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Program Perekonomian dan Pembangunan								
1	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]
PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005